



TINJAUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM IPS DI SEKOLAH DASAR

Oleh:

Naia Nova Indriani^{1*}, Lu'luil maknun²

^{1*2} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Email: noviaindrianaia@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37081/jipdas.v4i4.2017>

Article info:

Submitted: 13/07/24

Accepted: 16/11/24

Published: 30/11/24

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap proses pengembangan kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tingkat sekolah dasar (SD) dan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, dan peneliti yang tertarik dalam pengembangan kurikulum IPS di tingkat sekolah dasar. Metode ini menggunakan metode studi literature dengan menggunakan proses membaca dan mengumpulkan materi dari berbagai sumber jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, mencerminkan evolusi dalam pendekatan pendidikan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat dan zaman. Transformasi ini mencakup pengintegrasian disiplin ilmu sosial dengan fokus pada pembelajaran holistik dan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan berfungsi sebagai pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter, kewarganegaraan, dan pemahaman tentang masyarakat. Dengan setiap iterasi kurikulum, ada upaya untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan IPS sesuai dengan tuntutan global dan lokal saat ini.

Kata Kunci: IPS, pengembangan kurikulum, sekolah dasar

1. PENDAHULUAN

Pendidikan IPS berasal dari wilayah Rugby di Inggris selama revolusi industri pada tahun 1827. Pendidikan IPS juga dikenal sebagai studi sosial, yang dikembangkan oleh tim Rugby dan berfungsi sebagai sarana untuk meringankan efek revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menyebabkan pergeseran fokus dari masalah terkait tenaga kerja ke masalah terkait modal, yang mengakibatkan sejumlah besar investasi modal di sektor industri. Banyak faktor berdampak negatif pada karyawan yang tidak memiliki pelatihan formal, seperti kurangnya pengalaman dalam proses manufaktur. (Bisyada, 2014). Revolusi industri memiliki potensi untuk mengubah pekerja menjadi manusia dengan kemampuan mekanis. Hal ini dapat dilihat dalam setiap perselisihan industri di Inggris yang diselesaikan melalui mediasi. Ini merugikan pekerja yang tidak memiliki pengalaman kerja dan akhirnya akan berubah menjadi tenaga kerja yang tergantung pada industri, karena ada banyak industri yang menyediakan pekerjaan. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pengaruh karyawan yang tidak bekerja rumit. Sebagai permasalahan sosial yang ditambahkan akan mengurangkan peran keseharian mereka. Kebutuhan sehari-hari rakyat dipenuhi oleh pemerintah, yang tidak menyediakan kebutuhan rakyat. Ini dapat secara bertahap mengurangi pasokan pemerintah dan akhirnya mencapai mereka yang tidak memiliki sarana untuk membeli barang dan jasa. Pemerintah dapat bekerja dengan orang-orang untuk memastikan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Kebutuhan yang diprioritaskan, seperti kebutuhan yang harus dipenuhi agar tidak mempertimbangkan pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak anggota masyarakat terlibat dalam penindakan mengarah



terhadap penjahat sebagai akibat dari ketidakpuasan mereka untuk tunduk pada tuntutan pembayaran. Untuk menemukan solusi yang efektif untuk penutupan pembayaran pinjaman, siswa harus sepenuhnya berkomitmen pada studi mereka.

Rakyat pribadi memperoleh tugas dalam pembentukan dunia kependidikan. Tidak lama kemudian, konsep dan nilai-nilai mulai muncul tentang pelajaran IPS dan pelajaran IPS dalam konteks reintegrasi sosial di antara populasi berbahasa Inggris. Kelas IPS diajarkan di sekolah-sekolah di negara-negara. Hal ini juga dijelaskan oleh kurikulum IPS di sekolah-sekolah Amerika yang berbeda dengan sekolah di negara-negara berbahasa Inggris. Alasan mengapa pendidikan sangat buruk adalah sifat pendidikan yang berbasis etnis. Secara umum, ada tiga jenis pendidikan di Amerika pendidikan Aborigin, yang menguntungkan bagi mereka yang datang untuk belajar tentang Amerika secara keseluruhan; pendidikan Eropa, yang dipimpin oleh penduduk asli; dan pendidikan Afrika, yang diajarkan di luar Amerika. Mereka berkomunikasi secara efektif dan tidak menghadapi masalah. Namun, berdasarkan fakta yang diketahui, terjadi perang saudara antara bagian barat dan timur Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Perang Budak. Perang Perpendikuler, yang berlangsung selama empat tahun antara 1861 dan 1865, melihat Amerika terpecah menjadi dua kekuatan besar, dengan yang terakhir menderita prasangka ras yang parah. Menurut Gunawan (2021), putusnya persaudaraan di Amerika Serikat membuat sulitnya mempersatukan bangsa bahkan negara-negara besar. Kekuatan besar pun sulit dipersatukan. Melihat situasi ini membuat siswa lebih kooperatif dalam menangani masalah yang disebutkan di atas. Salah satu solusi yang sedang dilaksanakan saat ini adalah memasukkan studi sosial ke dalam kurikulum sekolah dengan menggabungkan bidang seperti sejarah, geografi, dan ilmu sipil. Karena Sejarah memiliki pengalaman bersama dalam pendidikan, ia diajarkan untuk melawan kebangsaan. Tujuan dari pendidikan geografi adalah untuk menjelaskan segalanya.

Nilai-nilai Amerika, sehingga dapat berpartisipasi dalam kesadaran tentang nilai-nilai di seluruh Amerika. Kemudian, pendidikan sipil dilakukan untuk menyediakan siswa dengan instruksi untuk menjadi warga negara yang baik dari Amerika Serikat. Studi Pendidikan Sosial Amerika. Dewan Nasional Studi Sosial Pendidikan (NCSS) menyediakan dana. Sekelompok orang dapat melakukan studi sosial di tingkat dasar dan menengah pendidikan, departemen studi sosial dan pendidikan (Sapriya, 2017). Semua tugas ilmu sosial dibuat oleh kelompok ini, dan materi dan pendekatan pengajaran yang digunakan di kelas, terutama di sekolah dasar dan menengah. Sebagaimana telah disebutkan, para ahli pendidikan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kurikulum ilmu sosial dalam kurikulum sekolah. Bukti lain menunjukkan bahwa tujuan pendidikan ilmu sosial mempunyai dampak berikut pada siswa:

- 1) Mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat.
- 2) Kehidupan sosial yang seimbang, dengan kata lain menekankan pentingnya kesadaran individu dan masyarakat,

Menurunnya kualitas IPS membawa dampak buruk terhadap perubahan realitas negara Indonesia. Pengembangan pendidikan dikelola oleh Ilmu Sosial Pendidikan, IPS Amerika dan Inggris. Penemuan penelitian konsisten dengan temuan Gunawan (2016) yang menemukan bahwa American Institute of Social Studies (IPS) merupakan sumber dari seluruh pendidikan ilmu sosial di Indonesia (Gunawan, 2021). Perkembangan pendidikan IPS di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap kurikulum IPS di Amerika Serikat, negara yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas akademik. Penyelidikan (Rachmah, 2014). Seminar Pendidikan Kewarganegaraan Tawang Mangu tahun 1972 membahas sejarah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Tiga jenis teori, termasuk beberapa yang diungkapkan secara sekuler, muncul dari pelatihan ilmu sosial, di mana temuan seminar di atas didasarkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan No. 008-D/N/1975 dan No. 008-E/N/1995 untuk program pendidikan sosial, yang dimulai pada tahun 1976. Sekolah-sekolah di Indonesia pertama kali memasukkan kurikulum pendidikan sosial. Sejak tahun 1970, misi pendidikan



ilmu sosial adalah mencapai tujuan akademik masyarakat. Sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional pada kurikulum 1975 untuk mencapai tujuan akademik masyarakat. Pengajaran ini dilegalkan sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional dalam kurikulum tahun 1975, Hal ini kemudian dikenal dengan program Sekolah Perintis Proyek Bangunan (PPP). Aspek kepemimpinan dalam kewarganegaraan di Tawangmangu konon bermula dari IKIP Bandung. Namun, beberapa pembuat kurikulum seperti Nu'man Somantri, Achmad Sanusi, Sedih Suwardi, dan Kosasih Dhjahiri termasuk. Misalnya, pengajaran IPS dimulai di sekolah dasar dan menengah pada tahun 1975, dan kurikulum sekolah SPG/SGO/SMPLB dibuat pada tahun 1976 Endayani (2017).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode studi literature dengan menggunakan proses membaca dan mengumpulkan materi dari berbagai sumber. Artikel dan jurnal ilmiah tersebut ditemukan melalui google scholar dan internet. Metode studi literatur adalah pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya. Studi literatur ini memiliki tujuan dalam meninjau bagaimana tinjauan pengembangan kurikulum IPS di sekolah dasar.

3. HASIL PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip pembelajaran IPS sistematis, menurut para pendidik Indonesia (Sapriya, 2017), dan ada hubungannya dengan sistem kurikulum yang tersedia di Indonesia saat ini. Selain itu, tren ini diperkuat oleh ketidaksepakatan mengenai siapa yang harus mengajar IPS di sekolah dan lembaga pendidikan formal Khusus di Indonesia yang diterapkan di kurikulum 1947, 1952, dan 1953. Tahun 1964 dan 1968, masing-masing. Dari berbagai mata pelajaran yang dianggap dapat membantu mengembangkan kepribadian siswa. Ini terkait dengan kemampuan siswa untuk merumuskan dan mencapai tujuan akademik. Dalam pelajaran geografi dan sejarah Indonesia, pelajaran ini termasuk dalam kelompok dasar. Selain itu, kedua pembelajaran ini mencakup pengelompokan dasar, serta pembelajaran lainnya seperti ilmu bahasa Indonesia dan ilmu warga. Kelompok kreatif kini dimasukkan ke dalam pelajaran sejarah dunia dan geografi. Namun Kurikulum 1964 merupakan kurikulum pertama untuk pembelajaran IPS. Dari tahun 1945 hingga 1964 tidak ada klasifikasi IPS, Namun pembelajaran ini mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Hal ini memungkinkan adanya peningkatan pemahaman melalui pelajaran sejarah, geografi, dan kehidupan masyarakat, serta pelajaran bertahap di sekolah dasar serta mata pelajaran antropologi, ekonomi, dan sosiologi di sekolah menengah (Sapriya, 2017). Peristiwa G30S/PKI berkontribusi dan mempengaruhi tumbuhnya pendidikan ilmu sosial. Peristiwa ini kemudian dapat teratasi dan terciptalah tatanan baru yang sebelumnya disebut tatanan lama (Bisyada, 2014). Baik pendidikan ilmu sosial di sekolah dasar maupun menengah, pengembangan pendidikan ilmu sosial dapat sangat penting. Somantri (2001) mengatakan bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar dan menengah terdiri dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta pendidikan dasar manusia. Untuk mencapai tujuan pendidikan, itu diajarkan secara pedagogis dan ditunjukkan secara ilmiah dan psikologis. Mereka mengatakan bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar dan menengah dapat digambarkan sebagai adaptasi dari program seksual. Di perguruan tinggi, pendidikan ilmu pengetahuan sosial sangat penting karena pemilihan disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta program dasar kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Disebutkan juga bahwa bidang keilmuan sangat beragam. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa beban pendidikan IPS berbeda di SMP dan perguruan tinggi. Meskipun isi mata kuliah berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial, pembedaan ini melibatkan penyederhanaan dan seleksi.

Kurikulum IPS tahun 1974-1975



Kurikulum Proyek Percontohan Sekolah Pengembangan (PPSP) di IKIP Bandung digunakan pada tahun 1972-1973 untuk memperkenalkan pendidikan IPS ke dalam kurikulum Indonesia (Huriah Rachmah, 2014: 43). Sapriya (2017: 11) menyatakan bahwa pendidikan ilmu sosial di Indonesia adalah bagian integral dari sistem pendidikan. dari dokumen kurikulum tahun 1975, yang menetapkan bahwa IPS harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar dan menengah. Pada tahun 1974, kurikulum IPS SMP terdiri dari geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai mata pelajaran utama. Selain itu, mata pelajaran tambahan seperti antropologi, sosiologi, dan ilmu politik dimasukkan (Hamid Hasan, 1996: 37). Konsep pendidikan ilmu sosial di Indonesia banyak menyerap konsep perkembangan ilmu sosial di luar negeri, dan evolusi pendidikan ilmu sosial ditandai dalam Kurikulum 1974.

Menurut Winataputra, Sapriya (2017: 42), Kurikulum 1975 menawarkan pendidikan IPS dalam empat profil:

- 1) Pendidikan Moral Pancasila diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan IPS khusus yang berfokus pada transmisi nilai-nilai kewarganegaraan.
- 2) Pendidikan IPS diintegrasikan di sekolah dasar.
- 3) Pendidikan IPS terkonfederasi di SMP, yang menggabungkan mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi dalam satu payung IPS.
- 4) Pendidikan Moral Pancasila diajarkan di sekolah menengah.
- 5) Pendidikan IPS dibedakan di sekolah menengah; SMA mungkin menawarkan mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, sementara SPG mungkin menawarkan mata pelajaran sejarah dan geografi.

Kurikulum IPS tahun 1984-1990

Kurikulum IPS tahun 1984 merupakan evolusi dari kurikulum sebelumnya, Kurikulum 1974 memasukkan mata pelajaran IPS. Kurikulum 1984 menggunakan nama IPS untuk menyebut pembelajaran dasar di sekolah dasar dan menengah. Hal ini berbeda dengan kurikulum 1974 (Gunawan, 2021). Berbeda dengan pendidikan ilmu sosial menengah (SMA), disiplin ilmu yang digunakan untuk menggambarkan pembelajaran ilmu sosial berbeda. Menurut Alhamuddin (2014), Pendekatan struktural IPS pada tingkat menengah serta pendekatan disipliner digunakan dalam proses pembelajarannya. Pendekatan struktural terpisah dari pendidikan IPS pada tingkat senior. Pengetahuan yang relevan dengan situasi lokal digunakan dalam artikel ini. Kurikulum IPS di sekolah menengah dipadukan dengan kurikulum IPS di sekolah menengah. Namun, kurikulum IPS di sekolah menengah diberikan secara terpisah dari keterbatasan materi yang diberikan kepada siswa dan berkaitan dengan bidang GBPP yang ada untuk setiap pelajaran. Kurikulum IPS yang disebutkan di atas dikembangkan secara terpadu dan tidak berbeda dengan kurikulum IPS di sekolah menengah dan SMA. Mereka diajarkan secara terpisah pada bidang sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, dan administrasi publik (Fauziah et al., 2022).

Pengembangan kependidikan IPS pada tahun 1990 memiliki dua landasan, yaitu:

- 1) Pendidikan IPS dianggap sebagai pendidikan kewarganegaraan, yang mencakup pelajaran tentang sejarah negara, kewarganegaraan, dan kepancasilaan.
- 2) Pendidikan IPS diberikan dalam bentuk pendidikan sosial.

Kurikulum IPS tahun 1994

Pendidikan IPS berfokus pada transformasi sejak Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Akibatnya, kurikulum diubah pada tahun 1994 untuk mendukung Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang sekarang dikenal sebagai Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).



Menurut Sapriya (2017), kurikulum juga dirancang dengan mempertimbangkan elemen ilmu sosial. Kurs yang dimaksud memiliki karakteristik berikut:

- 1) Pembelajaran IPS di sekolah dasar menggunakan pendekatan terpadu yang sesuai untuk kelas III hingga VI, tanpa fokus khusus pada kelas I dan II dalam kurikulum tersebut.
- 2) Metode pembelajaran IPS terus menerus menggunakan geografi, sejarah, dan ekonomi secara kooperatif.
- 3) kelas III hingga VI Sejarah Nasional, pembelajaran IPS di sekolah menengah didasarkan pada pendekatan terpadu.
- 4) Ilmu umum seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, meliputi bidang yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah Indonesia, di sisi lain, mempelajari evolusi masyarakat dari masa lampau hingga masa kini.

Berdasarkan pernyataan di atas, kurikulum 1994 dirancang untuk meningkatkan pendidikan IPS dan mencakup berbagai tingkat pendidikan dasar dan menengah. Namun, dijelaskan bahwa pelajaran IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah menengah atas dan ditawarkan secara terpisah di setiap jenjang pendidikan.

Kurikulum IPS tahun 2006 (KTSP)

Sejak tahun 2006, sebagian besar materi IPS telah berubah. Penjelasan ini dimulai sejak tahun lalu, guru telah menganalisis proses pembelajaran dan menciptakan landasan pembelajaran yang menerjemahkan konsep menjadi pembelajaran. Pembelajaran terfokus pada penguasaan dasar materi dan dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak siswa KKM menggunakannya. Siswa kemudian diberi kesempatan untuk belajar secara terarah tentang perbaikan dan pembelajaran yang tuntas. Penemuan ini memicu ide Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diluncurkan pada tahun 2003, tetapi tidak bertahan lama. Itu hanya digunakan selama dua tahun dan kemudian diperbarui. Hasilnya adalah Kurikulum 2006, yang juga dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pengajaran (KTSP).

Kurikulum ini didasarkan pada Standar Kompetensi (SK) dan Standar Kompetensi Dasar (KD), yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 mengenai standar isi. SK dan KD merupakan tindakan yang ditetapkan pemerintah untuk diberikan guru kepada siswa. Meskipun tidak dapat diperkecil dari ukuran tertentu, namun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini memperkuat metodologi pengembangan kurikulum (KTSP) di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum IPS sekolah dasar tidak mencakup semua bidang sains.



Sapriya (2017) menyatakan bahwa pembelajaran terbimbing dalam IPS dapat membantu mereka menjadi warga negara Indonesia yang bijaksana, demokratis, dan penuh kasih sayang. Pembelajaran IPS yang ditawarkan mulai kelas I sampai kelas VI dapat mencakup pendekatan dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Pendidikan Menengah (IPS) memadukan semua disiplin ilmu ilmu sosial. Salah satu contohnya adalah pendidikan ilmu sosial terpadu yang memadukan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi.

Sesuai dengan pembagian SK dan KD, guru akan diberikan buku IPS yang terintegrasi dan terpisah untuk kelas IPS. Pelajaran IPS di sekolah menengah ditentukan dan diajarkan secara individual. Salah satu tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan materi pembelajaran terencana yang membentuk berbagai disiplin ilmu sosial. Menurut Permendiknas (2006), kelas IPS di sekolah menengah dianggap sebagai kelompok ilmu pengetahuan. Namun, bidang ilmu sosial tradisional seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi juga diajarkan. Namun kelas IPS di SMK tidak berbeda dengan kelas IPS di SD dan SMP.

Kurikulum baru dibuat dan dipantau kembali oleh pemerintah pada tahun 2013. Perubahan peraturan pemerintah, termasuk perubahan di tingkat presiden Indonesia dan pemerintahan lainnya, dipengaruhi oleh perkembangan implementasi kurikulum tahun 2013. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan penulis kurikulum 2013, karena kebijakan pemerintah baru saja disahkan. Kurikulum 2013 tidak dapat dilaksanakan jika belum direvisi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1, Kompetensi Inti dan Keterampilan Belajar Dasar akan dibahas pada Edisi 24 Tahun 2016 ini. Kurikulum 2013 mentransformasikan kompetensi dasar menjadi standar kompetensi. Kompetensi inti sangat berbeda dengan kompetensi lainnya karena fokus pada bagaimana lulusan harus berperilaku spiritual. Pada kurikulum 2013, pembelajaran IPS dimasukkan ke dalam materi pelajaran, terutama di sekolah dasar dan menengah. Apabila diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran maka akan tercipta kombinasi topik yang mencakup disiplin ilmu lain yang saling mempengaruhi (Depdiknas, 2010). Pendidikan ilmu sosial kini menjadi hal yang lumrah, dan tujuannya adalah untuk memberikan siswa kesempatan dan persiapan untuk langkah ke jenjang pendidikan tinggi. Kurikulum 2013 juga memasukkan pembelajaran IPS melalui buku pelajaran bertema yang mencakup berbagai mata pelajaran, terutama untuk pendidikan dasar. Metode Higher Thinking Skills (HOTS) dalam pendidikan IPS harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kurikulum 2013. Keterampilan HOTS adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk menghadapi perkembangan saat ini dan menjadi mahir di seluruh dunia (Sa'adah et al., 2020). Metode ini sesuai dengan pendidikan IPS yang diajarkan dalam kurikulum 2013 dan meningkatkan kemampuan yang luas pada siswa sebesar 92,59%, yang berdampak signifikan pada prestasi belajar IPS siswa (Putra et al., 2021). Menurut Haryani (2022). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim merancang program yang mencakup kurikulum merdeka. Kebebasan belajar merupakan salah satu bentuk kecanggihan budaya dengan tidak melupakan isi penilaian. Landasan pembelajaran mandiri akan dikembalikan ke pemerataan pendidikan di negara tersebut berdasarkan undang-undang yang mengecualikan sekolah dari penilaian sesuai dengan interpretasi kurikulum terhadap kompetensi dasar. Ada pula yang berpendapat bahwa kebebasan belajar diberikan secara cuma-cuma melalui otonomi lembaga pendidikan, bebas dari birokrasi apa pun. Instruktur diberikan kebebasan birokrasi untuk memilih mata pelajaran utama berdasarkan kepentingan masing-masing. Kemandirian belajar dapat dikatakan merupakan program yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dilaksanakan untuk kembali pada integrasi pendidikan nasional dan pengutamaan sekolah berdasarkan undang-undang. Guru dan siswa harus berimprovisasi, mempunyai otonomi, kreatif dan inovatif untuk memajukan pendidikannya. Hakikat belajar mandiri adalah kebebasan. Kebebasan artinya Sekolah, pendidik, dan siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan ide baru, berkreasi, dan mandiri. Kurikulum belajar mandiri muncul akibat adanya keluhan siswa yang tidak mencapai nilai ketuntasan minimal yang dituju. Adanya sistem belajar mandiri memungkinkan siswa dan guru menciptakan situasi belajar yang nyaman di sekolah. Disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Menyederhanakan RPP



dan mempermudah pengajaran bagi guru menghilangkan unsur menyenangkan guru dalam memberikan materi untuk membantu siswa menikmati proses pembelajaran.

Proses pembelajaran pada kurikulum mandiri tidak menitikberatkan pada guru sebagai sumber utama ilmu pendidikan. Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menggali pengetahuan melalui kurikulum gratis, dan guru memperluas pengetahuan dan keterampilannya sebagai pendidik. Tujuan Merdeka Belajar difokuskan pada pembelajaran yang efektif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, serta membantu siswa menerapkan metode yang digunakan guru. Setelah tantangan teridentifikasi, guru harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pemanfaatan sarana prasarana belajar mandiri yang diterapkan di sekolah dasar merupakan salah satu cara untuk mempermudah pelaksanaan ujian nasional, mempermudah perencanaan pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru. Dengan menyederhanakan kurikulum, kami ingin memastikan bahwa kemampuan lulusan kami tetap relevan dan berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut Daga (2020), Tujuan masa depan adalah pusat penyederhanaan. Setelah itu, sekolah menjadi semakin sulit karena masa ujian. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum sejalan dengan pencapaian standar keberhasilan pembelajaran nasional. Penerapan berikut ini menyederhanakan RPP dan membaginya menjadi tiga elemen yang masing-masing berjumlah 13 elemen. Tujuan penyederhanaan unsur ini adalah agar pembelajaran dapat dirancang berdasarkan rencana yang dibuat guru berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Menyederhanakan RPP dan mempermudah pengajaran bagi guru menghilangkan unsur menyenangkan guru dalam memberikan materi untuk membantu siswa menikmati proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada kurikulum mandiri tidak menitikberatkan pada guru sebagai sumber utama ilmu pendidikan. Guru berkolaborasi dengan siswa untuk menggali pengetahuan melalui kurikulum gratis, dan guru memperluas pengetahuan dan keterampilannya sebagai pendidik. Tujuan Merdeka Belajar difokuskan pada pembelajaran yang efektif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, serta membantu siswa menerapkan metode yang digunakan guru. Setelah tantangan teridentifikasi, guru harus menemukan cara untuk menyelesaikannya.

4. KESIMPULAN

Pendidikan IPS di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari kurikulum awal hingga saat ini. Meskipun ada perubahan dalam pendekatan dan struktur kurikulum, prinsip-prinsip pembelajaran IPS sistematis tetap terintegrasi untuk mendukung pengembangan siswa sebagai warga negara yang cerdas, kritis, dan berkompeten dalam konteks global. Upaya terbaru dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan dorongan untuk lebih menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa, seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Yunita Benu, A., Lioba Nahak, R., Citra, U., Nusa, B. /, & Timur, T. (2022). Pengembangan media Pembelajaran IPS Card Match Circle dalam pembelajaran Tematik Sekolah Dasar. In *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)* (Issue 5).
- Nora, Y., Gistituati, N., & Bentri, A. (2022). Tinjauan Pengembangan Kurikulum IPS di Sekolah dasar. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(6), 1931. <https://doi.org/10.33578/jpkip.v11i6.9249>



- Keilmuan, J., Dasar, P., Pendidikan Guru, J., & Dasar, S. (2023). Pelita Calistung: Tinjauan Kritis atas Permasalahn dalam Pembelajaran IPS di Sekolah dasar Anna Trihartini. *Bulan Agustus Tahun, 2*, 139–147. <https://jurnal.upg.ac.id/index.php/>
- Institut, P., Islam, A., Muhammad, S., & Sambas, S. (2020). *Pembelajaran IPS di sekolah dasar*. 3(2), 96.
- Hermakori, Z., Indah Yani, N., Levia, O., Arfika, R., Guru Madrasah Ibtidaiyah, P., Tarbiyah dan Tadris, F., & Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, U. (n.d.). Perkembangan Kurikulum Pendidikan IPS SD/MI (Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka). *Publisher: Yayasan Khairul Azzam Bengkulu Journey: Journal of Development and Reseach in Education*,
- Bibliometik Umar, A., Indra Jayanti, M., & Rahman, A. (2023). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar ISSN*. 7(2). <https://doi.org/10.52266/Journal>
- Kadek Ratih Apriani, N., Ikhwani, N., Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, P., & Mataaram, U. (n.d.). Komparasi Pembelajaran IPS Pada Kuriukulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. In *Jurnal Wawasan Pendidikan Tatas* (Vol. 2).
- Pangestuti, D., Noviyanti, S., Chan, F., Fadli, K., & Damayanti, G. (n.d.). Analisis Pembelajaran IPS dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 1467–1481.
- Fitria Sani, E., & Safitri, D. (n.d.). *Cendekia Pendidikan Systematic Literature Review: Promblematika Pembelajaran IPS Pada Abad 21*. 3, 10–2024.
- Abdullah, A. (2007). Kurikulum Pendidikan di Indonesia sepanjang sejarah (suatu tinjauan kritis filosofis). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(66), 340–361. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i66.354>
- Fatimah, S., Maulidiana, F., Nadia Putri, A. N., & Siti Qomariyah, R. (n.d.). *Education Enthusiast: Jurnal Pendidikan dan Keguruan ISSN 2774-9916 (Print), 2745-603X (Online) Perkembangan Kurikulum IPS SD*.
- Nurdiana Sari, W., Faizin, A., Muria Kudus, U., & Hidayatul Muhtadiin, M. (n.d.). Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 2023.
- Fauziah, N. N., Lestari, R., Rustini, T., & Arifin, Muh. H. (2022). Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia pada Tingkat Sekolah Dasar. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.29240/jpd.v6i1.4359>
- Siska, Y., & Japar, M. (n.d.). Nilai pendidikan karakter dalam Pembelajaran IPS di sekolah dasar. In *Journal of Elementary School Education* (Vol. 1).



- Purwanto, A. (2021). Pengembangan Kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) di Sekolah Dasar Islam Terpadu. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 335–342. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1928>
- Fitriyani, Y., Supriatna, N., & Sari, M. Z. (2021). Pengembangan Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Kreatif pada Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(1), 97. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3462>
- Panggabean, M., & Kurniaman, O. (n.d.). *Pengembangan media wayang kartun untuk pembelajaran IPS di sekolah dasar. 1*. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/Aquinas/index>
- Dadi, F. B. (n.d.). *Kebijakan pengembangan kurikulum di sekolah dasar*.
- Setiana, N. (n.d.). *Pembelajaran IPS Terintegritas dalam konteks kurikulum 2013*. Pembelajaran IPS Terintegrasi.
- Hanif Ibrahim, A., Dasar Swasta, S., & Sawit, W. (n.d.). *Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dasar Swasta 1 Wana Sawit Kotawaringin Barat*.
- Komang Wahyu Wiguna, I., Adi Nugraha Tristianingrat, M., & Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, S. (2022). *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar Langkah Mempercepat Perkembangan Kurikulum Merdeka Belajar*. 3(1), 17–26. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/edukasi>
- Pendidikan, D., Badan Penelitian, N., Pengembangan, D., & Nasional, P. (n.d.). *Model pembelajaran terpadu IPS SMP/MTs/SMPLB*.
- Dan, Y., & Sulistyowati, P. (n.d.). *Kajian kurikulum sekolah alam dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter siswatingkat sekolah dasar*.
- Abustang, P. B., Sumantri, M. S., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis implementasi pendidikan karakter siswa pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. In *JKPD) Jurnal Kajian Pendidikan Dasar* (Vol. 8).
- Kusumadewi, S., & Artikel, I. (2019). *Pengembangan model manajemen kurikulum berbaris penguatan pendidikan karakter untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar*. <http://jurnal.umk.ac.id/index.php/RE>